

Pengantar

Perubahan menuju demokrasi yang tengah berlangsung di Indonesia menghadapi tantangan yang berat. Sejumlah masalah serius terus mendera berbagai sektor, baik sektor politik, administrasi publik, sistem hukum, swasta maupun sektor lainnya. Berbagai bentuk korupsi yang menggurita, yang sejak reformasi sering disebut dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sejak Orde Baru merasuk ke hampir semua bidang kehidupan bangsa merupakan ancaman yang paling serius itu. Transparency International menjuluki Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

Setelah bencana gempa bumi dan tsunami melanda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan sebagian Sumatera Utara pada 26 Desember 2004, arus barang dan uang datang ke Aceh dalam jumlah yang cukup besar, sebagai dana darurat dan rekonstruksi. Pemerintah Indonesia sendiri mengalokasikan 41 triliun rupiah untuk dana tanggap darurat dan rekonstruksi itu. Mengingat wabah korupsi telah menjadi penyakit yang sistemik di Indonesia, maka munculah kekhawatiran bahwa bantuan rekonstruksi yang cukup besar itu akan berakhir di tangan yang salah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun saat itu menyatakan akan mengaudit anggaran negara maupun dana yang bukan berupa anggaran negara. Namun, proses rekonstruksi harus tetap diselidiki oleh pihak yang independen. Memiliki negara yang aparaturnya dan elitnya korup adalah satu hal, tetapi mengkorup bantuan kemanusiaan bagi lebih dari 200 ribu orang yang kehilangan kehidupan akan menempatkan Indonesia ke tingkat integritas terendah di mata dunia. Sehingga penting untuk melihat bahwa dana-dana tersebut tidak disalahgunakan.

Media memainkan peran penting dalam mendorong terwujudnya demokrasi. Dengan menyelidiki kinerja para politikus, pemerintah,

perusahaan swasta dan lain-lain, hadirnya pers yang independen di masyarakat akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam masa transisi menuju masyarakat demokratis yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, dengan aturan hukum sebagai elemen intinya.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) telah aktif bergerak sejak tahun 1994 untuk ikut membangun kebebasan pers, independensi dan profesionalisme jurnalis di Indonesia, yang hilang selama tiga dekade sejak tahun 1970-an di bawah otoritarianisme kekuasaan Soeharto dan Orde Barunya. Demokrasi, akses publik terhadap informasi dan tata pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan pers yang bebas dan independen, profesionalisme jurnalis sekaligus kesejahteraan pekerja media adalah tujuan utama seluruh aktivitas AJI.

Situasi Aceh dan bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar untuk Aceh, menantang para jurnalis agar menghasilkan karya-karya jurnalistik, terutama karya investigatif yang berbobot, guna mengungkap apa yang terjadi di Aceh, sebagai bagian dari salah satu negara yang terkorup di dunia. Kerja-kerja investigasi dan buahnya akan selalu dibutuhkan masyarakat dalam situasi apa pun. Jurnalis, memiliki akses hingga ke tingkat akar rumput yang mungkin lepas dari pengamatan aktivis antikorupsi internasional, komisi atau Bank Dunia. Hal yang dibutuhkan sekarang ialah jurnalis Indonesia, karena kemampuannya menggali informasi yang lebih dalam dan dapat dipertanggungjawabkan, membuat apa yang mereka peroleh menjadi laporan mendalam yang penting dan berguna bagi masyarakat.

Aceh sebelumnya merupakan daerah tertutup bagi wartawan. Setelah kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, situasi menjadi lebih terbuka. Bagi jurnalis Aceh, beberapa kesulitan meliput di daerah GAM mulai berkurang. Begitu pula bagi jurnalis non-Aceh yang ingin meliput di wilayah yang pernah didominasi GAM. Jurnalis dapat

menemukan berbagai kasus untuk dilaporkan yang sebelumnya kasus-kasus tersebut tidak bisa digali.

Situasi terakhir ini menguntungkan. Demikian pula tujuan bahwa permasalahan di Aceh bisa mendapat perhatian media nasional juga penting, sehingga kontribusi jurnalis non-Aceh juga merupakan keuntungan. Pertama, masalah itu akan membawa pada pemulihan dan rehabilitasi Aceh di media mainstream, baik cetak maupun elektronik. Kedua, jurnalis non-Aceh dapat menyuntikkan semangat baru dengan bertukar pengalaman melaporkan rekan-rekan lokal mereka.

AJI teringat pandangan Direktur dan Perwakilan Badan Dunia untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (Unesco) untuk Indonesia, Stephen Hill, dalam suatu seminar di Jakarta pada awal 2005 mengungkapkan, pemberantasan korupsi di negara ini akan semakin cepat bila pers melakukan peliputan investigasi. Peliputan investigasi memiliki kekuatan (akuntabilitas publik) yang mampu membongkar kebusukan di masyarakat serta mendorong terwujudnya demokratisasi. "Mantan Presiden Amerika Serikat, Nixon, jatuh akibat peliputan investigasi wartawan karena (dia) terkait kasus korupsi Watergate. Banyak lagi contoh kekuatan peliputan investigasi, misalnya kasus mantan Presiden Filipina Joseph Estrada," ujar Hill pada Seminar Peran Media dalam Memerangi Korupsi: Jurnalisme Investigatif dalam Praktik yang diselenggarakan Unesco di Jakarta, sebagaimana dikutip oleh harian Kompas, edisi 16 Januari 2005.

Namun Hill juga mengingatkan, peliputan investigasi hanya dapat dilakukan bila ada kebebasan pers. Dalam masalah ini, pers Indonesia sebenarnya sudah tidak ada masalah, karena sudah memiliki kebebasan sejak jatuhnya mantan Presiden Soeharto. Namun persoalannya adalah, kebebasan pers yang sudah ada belum cukup mendorong munculnya gairah untuk melakukan peliputan investigasi.

Hill benar. Namun pers Indonesia memang menghadapi masalah yang lebih besar saat ini. Penyebabnya, selama kekuasaan rejim otoriter Orde Baru, peliputan investigasi tidak mendapatkan tempat sama sekali. Selama tiga dekade pers harus tiarap untuk menyelamatkan diri dari cengkeraman kekuasaan yang membungkam masyarakat. Akibatnya media mainstream yang ada dan sebagian besar masih tetap hidup hingga kini, tidak mampu menjalankan fungsinya dengan benar. Karya jurnalistik yang lahir tidak berbobot; sekadar talking news, penuh yargon, tidak mendalam, kabur, sulit dipahami, dan acap sekadar menjadi pelantang keinginan penguasa terutama penguasa politik dan ekonomi. Kondisi semacam itu membuat banyak jurnalis tidak terasah untuk melahirkan karya yang berbobot, apalagi yang merupakan hasil peliputan investigasi.

Lebih celaka lagi setelah Orde Baru tumbang muncul gejala buruk lainnya, semakin kuatnya kekuatan ekonomi masuk ke tubuh pers. Kondisi ini merangsek sebagian perusahaan pers ke arah kegiatan mencari keuntungan belaka, yang dampaknya semakin menutup ruang bagi jurnalis untuk mengembangkan diri, termasuk dalam hal melakukan peliputan investigasi. AJI beruntung karena memiliki kesempatan untuk mengundang jurnalis Aceh maupun luar Aceh datang mengikuti program pelatihan sekaligus melakukan liputan investigasi di Aceh pada pasca pelatihan. Sebanyak 12 jurnalis (cetak /online, tv, dan radio) dari 24 pelamar yang mengajukan proposal liputan memperoleh kesempatan itu. Hasil peliputan mereka kemudian diterbitkan dalam sebuah buku kompilasi.

Melalui kompilasi ini, kami ingin menyajikan hasil laporan mereka itu, yang telah diterbitkan di media mereka masing-masing. Meskipun dengan kualitas yang terbatas, kompilasi karya yang mengandung sejumlah penyakit bahkan sebagian mendasar ini, telah memunculkan beragam isu mengenai persoalan korupsi di Aceh, dari soal pendidikan, kesehatan hingga

pembalakan liar.

Kompilasi ini diberi judul "Rembukan Gelap" (Perbincangan gelap), sebagai kumpulan laporan tentang kasus-kasus korupsi di Aceh pasca tsunami. Melalui kompilasi ini sidang pembaca dapat menemukan berbagai pertanda betapaguritakorupsiitutelahmengakarjauhketubuhbangsaini,hinggakesetiapsudutnya. Melalui kompilasi ini pula, sebenarnya AJI hendak mengulurkan tangan kepada semua pihak, yang berkepentingan dengan hadirnya kebebasan pers sebagai kemestian hidupnya demokrasi, untuk bergandengan membangun profesionalisme pers dan jurnalis baik demi terjaganya kebebasan pers itu sendiri maupun terjaganya kehidupan yang demokratis.

Editor